

# PAK PRESIDEN, KAMI PUNYA IDE LAIN

## PEMANGKASAN ANGGARAN UNTUK KEADILAN FISKAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Media Wahyudi Askar • Bakhrul Fikri • Jaya Darmawan  
Galau D. Muhammad • Bara Muhammad Setiadi

# 1 1 Pemerintah Memangkas Anggaran. Untuk Apa?

## Analisis CELIOS Terkait Rencana Pemangkas Anggaran

Skenario	Setuju	Pikirkan kembali	Hentikan
<b>Pelaksanaan MBG</b>			
<b>Pemangkas anggaran dengan potensi Rp306,7 T</b>			
<b>MBG untuk semua anak</b>			
<b>Rp400 T dialokasikan hanya untuk pembiayaan MBG</b>			
<b>Penambahan pemangkas anggaran dari pos DPR/MPR, Kemhan, Polri, dan TNI</b>			
<b>Pembiayaan IKN</b>			
<b>Proyek Food Estate</b>			

Pemangkas anggaran yang tidak efektif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp306,7 triliun<sup>1</sup> merupakan langkah yang baik. Tetapi, jika tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki struktur fiskal. Langkah ini juga membuka ruang untuk membenahan kebijakan fiskal dengan mengarahkan anggaran kepada sektor-sektor yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta mendorong efisiensi dalam sistem pemerintahan.

Namun, apakah tepat jika pemangkas anggaran semata hanya ditujukan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

### Rekomendasi CELIOS

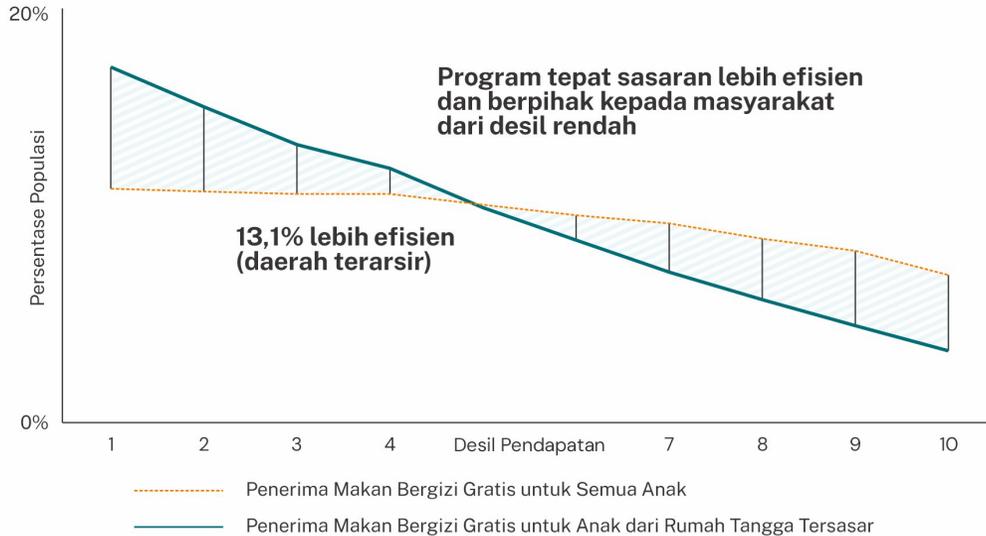
-  **MBG tepat sasaran (anak-anak di wilayah 3T, keluarga miskin, serta balita dan ibu hamil)**
-  **Rp306,7 T dialokasikan untuk MBG yang lebih tepat sasaran dan sisanya untuk peningkatan perlintos**
-  **Penambahan penerimaan lewat pajak alternatif (tidak hanya utak atik anggaran)**







### Grafik 1. Proyeksi Penerima Program Makan Bergizi Gratis

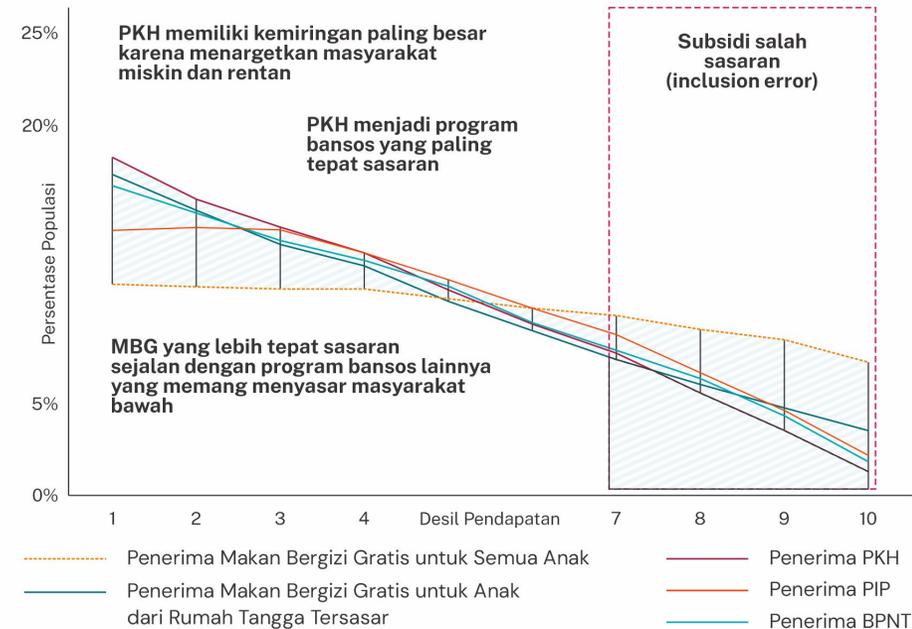


Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

**Pemerintah merancang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema *universal coverage* yang mencakup seluruh anak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi individu<sup>3</sup>.**

Akan tetapi, berdasarkan estimasi CELIOS, terdapat potensi ketidaktepatan sasaran dalam implementasi kebijakan ini. Studi CELIOS menunjukkan bahwa MBG idealnya lebih tepat diterima oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2 juta ke bawah<sup>4</sup>.

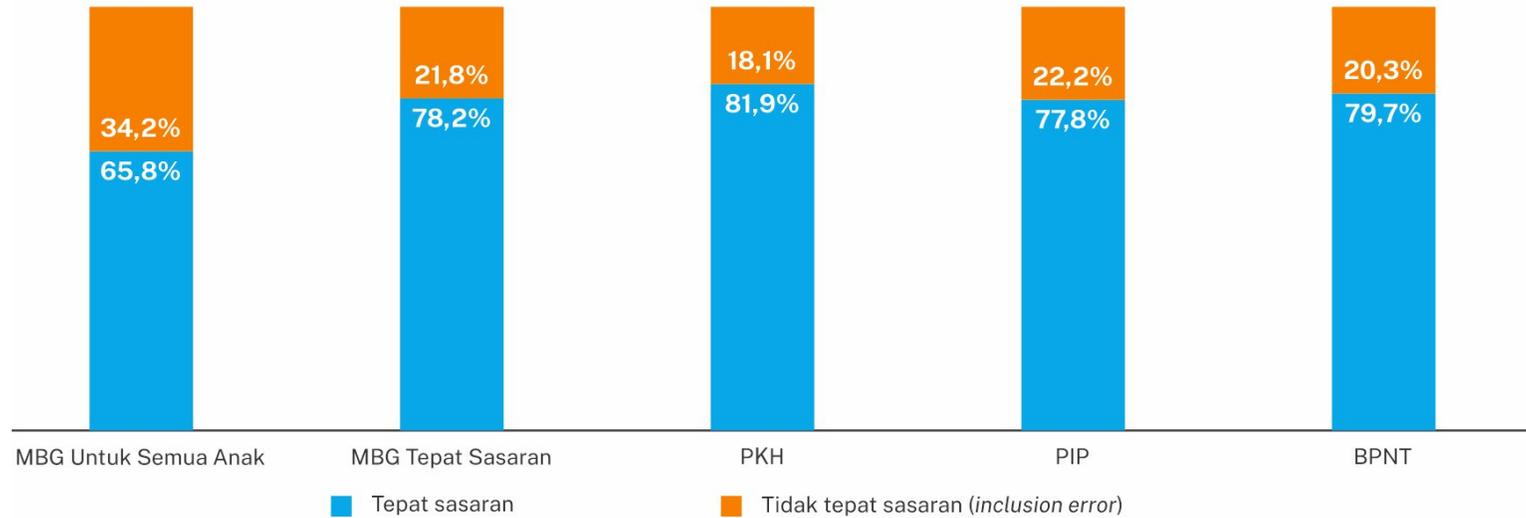
### Grafik 2. Makan Bergizi Gratis Dibandingkan Program Bantuan Lain



Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

Program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti PKH dan MBG untuk rumah tangga terasir, lebih efektif dalam menjangkau kelompok ekonomi menengah ke bawah dibandingkan program universal. PKH memiliki distribusi paling tajam ke desil pendapatan rendah, sementara MBG universal (semua anak) cenderung lebih merata. Namun, ketika MBG ditargetkan ke rumah tangga miskin, distribusinya lebih mirip dengan bantuan sosial lainnya, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi.

### Grafik 3. Inclusion Error dari Bantuan Sosial di Indonesia



Sumber: BPS. Data Mikro Survei Ekonomi Nasional 2023. Diolah oleh peneliti.

**Jika anggaran penghematan sebesar Rp306,7 triliun seluruhnya dialokasikan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), hal ini berisiko mengarah pada pemborosan fiskal yang besar.**

**Apabila MBG diberikan kepada semua anak, maka terdapat anggaran MBG sebesar Rp50,72 Triliun yang malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya.**

# 2 Pak Presiden, Kami Punya Ide Lain

CELIOS mendukung implementasi MBG dengan pendekatan yang lebih terarah (*targeted approach*), khususnya bagi kelompok rentan.

Prioritas penerima manfaat mencakup:

- 1 Anak-anak di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
- 2 Keluarga miskin dan yang mengalami malnutrisi.
- 3 Balita dan ibu hamil yang membutuhkan dukungan gizi dan kesehatan.

Dengan skema yang lebih terarah (*targeted approach*), kebutuhan anggaran per tahun untuk membiayai MBG hanya sebesar Rp117,93 triliun. Skema ini jauh lebih efisien, tepat sasaran, berdampak, dibandingkan skema pemerintah yang menghabiskan anggaran hingga Rp400 triliun, tetapi sebagian anggaran dinikmati anak-anak dari keluarga kaya.

## Proyeksi Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis



Nomor	Kategori	Jumlah Anak (1)	Biaya Harian (2) = (1)*Rp 10000	Biaya Tahunan (3) = (2)*43 minggu*5 hari	Biaya tahunan + operasional (4) = (3)*4/3
A	Perkiraan Biaya Harian untuk Semua Anak 6-18 Tahun	58,83 Juta	588,32 Miliar	126,49 Triliun	168,65 Triliun
B	Jumlah Ibu Hamil	4,8 Juta	48,00 Miliar	10,32 Triliun	13,76 Triliun
C	Perkiraan Biaya Harian untuk Anak Tinggal di Rumah Tangga Malnutrisi	35,66 Juta	356,56 Miliar	76,66 Triliun	102,21 Triliun
D	Perkiraan Biaya Harian untuk Semua Anak di Daerah 3T	2,21 Juta	22,13 Miliar	4,76 Triliun	6,34 Triliun
E	Perkiraan Biaya Harian untuk Anak dengan Malnutrisi di Daerah 3T	1,53 Juta	15,30 Miliar	3,29 Triliun	4,39 Triliun
F = C + D - E	Demografi Sasaran	36,33 Juta	363,39 Miliar	78,13 Triliun	104,17 Triliun
G = F + B	Sasaran + Ibu Hamil	41,13 Juta	411,39 Miliar	88,45 Triliun	117,93 Triliun
H = A - F	Penghematan dari MBG untuk Semua Anak (subsidi tidak tepat)				<b>50,72 Triliun</b>
I	Efisiensi Anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025				<b>306,7 Triliun</b>
J	Alokasi APBN 2025 untuk MBG				<b>71 Triliun</b>
K = G - J	Tambahan Alokasi untuk MBG Tepat Sasaran				<b>46,93 Triliun</b>
L = I - K	Penghematan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025				<b>259,76 Triliun</b>

**Terdapat dana surplus dari penghematan anggaran sejumlah Rp259,76 triliun. Daripada menggeser semua anggaran ini ke MBG, dana ini dapat dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas.**

# Rp259,76 Triliun Bisa Buat Apa Saja?

## Program Keluarga Harapan

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp30,37 triliun	10,16 juta KPM

Menambah jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 10,16 juta KPM dengan bantuan sebesar Rp2,98 juta per KPM.

## Program Indonesia Pintar

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp13,71 triliun	18,89 juta siswa

Menambah jumlah penerima manfaat PIP sebanyak 18,89 juta siswa dengan bantuan sebesar Rp725,58 ribu per siswa.

## Program Kartu Sembako

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp45,93 triliun	19,10 juta KPM

Menambah jumlah penerima manfaat program kartu sembako sebanyak 19,1 juta KPM dengan bantuan sebesar Rp2,4 juta per KPM.

## Beasiswa Kuliah (KIP, Afirmasi, dan Unggulan)

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp14,49 triliun	1,04 juta mahasiswa

Meningkatkan jumlah penerima beasiswa kuliah sebanyak 1,04 juta mahasiswa dengan bantuan sebesar Rp13,94 juta per mahasiswa.

## Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp4,98 triliun	1,38 juta pekerja

Menambah jumlah penerima manfaat BSU sebanyak 1,38 juta pekerja dengan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama setahun.

## Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp10,82 triliun	3,01 juta KPM

Menambah jumlah penerima manfaat BLT Desa sebanyak 3,01 juta KPM dengan bantuan sebesar Rp3,59 juta per KPM.

## Subsidi Tiket KRL

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp1,80 triliun	Rp6.098/55km

Membuat harga tiket KRL Jakarta - Bogor menjadi Gratis.

## Subsidi Alat Kesehatan Disabilitas (Kursi roda, kacamata, prostetik, dll)

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp445,81 miliar	4,52 juta orang

Menambah jumlah penerima subsidi alat kesehatan disabilitas sebanyak 4,52 juta orang dengan nilai subsidi sebesar Rp98,5 ribu per orang.

## Subsidi Angkutan Umum

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp444,91 miliar	44,49 juta orang

Menambah penerima subsidi angkutan umum sebanyak 44,49 juta orang. Sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mewujudkan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat dengan manfaat subsidi sebesar Rp10.000 per orang.

## Subsidi Pupuk

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp54,86 triliun	- 9,7 juta ton pupuk - 16,89 juta hektare lahan - 9,98 juta petani

Menambah jumlah pupuk subsidi sebesar 9,7 juta ton. Sehingga dapat memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk petani sebanyak 14,5 juta ton yang tercatat dalam RDKK 2025<sup>7</sup>. Tambahan lahan yang akan terpenuhi sebesar 16,89 juta hektare dan akan ada tambahan 9,98 juta petani yang menerima manfaat subsidi.



CELIOS

# Rp259,76 Triliun Bisa Buat Apa Saja?

## BPJS Kesehatan (PBI JKN)

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp47,21 triliun	98,35 juta orang

Menambah penerima bantuan iuran BPJS kesehatan mencapai 98,35 juta orang. Perluasan penerima akan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## Subsidi Asuransi Kendaraan Bermotor (TPL)

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp5,49 triliun	Rp34.856 per kendaraan

Memberikan subsidi premi asuransi kendaraan bermotor TPL Rp34.856 per kendaraan selama setahun untuk setiap kendaraan bermotor di Indonesia yang berjumlah 157,4 juta kendaraan.

## Program Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp246,49 miliar	- PLTS Terpadu 3T : 22 unit - PLTMH : 5 unit - Revitalisasi Pembangkit EBT : 5 unit - PLTM : 1 Unit

Menambah pembangunan 22 unit PLTS Terpadu di wilayah 3T, PLTMH 5 unit, Revitalisasi Pembangkit EBT 5 unit, dan PLTM 1 unit. Langkah ini sebagai bentuk komitmen awal subsidi EBT berbasis komunitas dalam adaptasi dan optimalisasi energi terbarukan.

## Program Percepatan Fasilitas Air dan Sanitasi

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp4,20 triliun	333.969 SR

Menambah fasilitas air minum dan sanitasi sebanyak 333.969 sambungan rumah (SR). Jika diasumsikan rata-rata jumlah SR di daerah 3T berkisar antara 75 - 125 SR, maka tambahan anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan fasilitas air minum dan sanitasi di 2.672 hingga 4.453 desa. Sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mendorong perbaikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

## Subsidi Rumah MBR

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp19,08 triliun	223.521 unit

Menambah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 223.521 unit rumah dengan nilai subsidi mencapai Rp85,34 juta/unit.

## Tunjangan Kinerja Dosen ASN

Tambahan Anggaran	Tambahan Manfaat
Rp5,7 triliun	47.043 dosen

Melunasi tunjangan kinerja seluruh dosen ASN yang belum dibayarkan dari tahun 2020 - 2024.

celios.co.id

## Pemangkasan anggaran dapat digunakan untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp151,7 triliun<sup>8</sup> per tahun. Seiring dengan perluasan cakupan kepesertaan per Juni 2024 yang telah mencapai 97,9 persen dari penduduk Indonesia. Terlebih, biaya layanan jaminan kesehatan (cost per member per month) sudah melonjak signifikan hingga melebihi penerimaan iuran (premium per member per month). Serangkaian faktor krusial yang memperlebar penerimaan dan pembiayaan layanan kesehatan meliputi peningkatan utilisasi layanan kesehatan sejak pasca pandemi Covid-19. Kondisinya semakin diperparah dengan lonjakan ketidakaktifan peserta dalam membayar iuran yang berkontribusi pada menipisnya aset neto dana jaminan sosial kesehatan.

# 3

## Apakah sebaiknya MBG dikelola pemerintah atau swasta?

Saat ini pemerintah memiliki 2 skenario pelaksanaan program yaitu "dikelola pemerintah" yang mana tidak mengalokasikan margin/fee operator di lapangan atau "dikelola oleh swasta" dengan skema *management fees*/margin .

**Jika pemerintah tetap memaksa MBG untuk semua anak dan pengelolaan yang melibatkan swasta, maka pemerintah juga harus bersiap menghadapi ancaman inefisiensi keuangan negara.**

### Skenario Anggaran Rp400 triliun (2026)

	Dikelola Pemerintah	Dikelola Swasta
<b>Total Anggaran (Rp)</b>	<b>400 triliun</b>	<b>400 triliun</b>
Anggaran per Paket (Rp)	15.000	15.000
Margin/Fee Operator (Rp)	0	5.000
Anggaran Riil per Paket (Rp)	15.000	10.000
Manfaat (persentase)	100%	66,7%
<b>Risiko Inefisiensi Keuangan Negara (persentase manfaat hilang x total anggaran)</b>	<b>Rp133,4 triliun</b>	

Catatan : Simulasi dibuat sesuai wacana pemerintah yang akan menetapkan anggaran MBG pada tahun 2026 sebesar Rp400 triliun<sup>10</sup>. Anggaran per paket senilai Rp15.000<sup>11</sup> digunakan sesuai wacana awal pemerintah.

### Skenario Anggaran Rp171 triliun (2025)

	Dikelola Pemerintah	Dikelola Swasta
<b>Total Anggaran (Rp)</b>	<b>171 triliun</b>	<b>171 triliun</b>
Anggaran per Paket (Rp)	15.000	15.000
Margin/Fee Operator (Rp)	0	5.000
Anggaran Riil per Paket (Rp)	15.000	10.000
Manfaat (persentase)	100%	66,7%
<b>Risiko Inefisiensi Keuangan Negara (persentase manfaat hilang x total anggaran)</b>	<b>Rp57 triliun</b>	

Catatan : Simulasi ini menggunakan total anggaran sejumlah Rp171 triliun karena terdapat wacana pemerintah menambah anggaran Rp100 triliun<sup>9</sup> di tahun 2025 sebagai tambahan anggaran yang sudah disetujui sebesar Rp71 triliun. Anggaran per paket senilai Rp15.000<sup>10</sup> digunakan sesuai wacana awal pemerintah.

# 4

## Efek Pemangkasan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil	13,90 triliun
Dana Alokasi Umum	15,67 triliun
Dana Alokasi Khusus Fisik	18,30 triliun
Dana Otonomi Khusus	509,45 miliar
Dana Keistimewaan DIY	200 miliar
Dana Desa	2 triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025<sup>13</sup>.

### Dampak Sosial

#### Pengurangan Layanan Publik

- Sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya bisa mengalami penurunan kualitas karena keterbatasan dana.
- Contoh : Pengurangan pendanaan untuk perawatan infrastruktur puskesmas, dukungan terhadap penyandang cacat, anak terlantar dll.

#### Meningkatnya Ketimpangan Antar Daerah

- Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah akan lebih terdampak dibandingkan daerah yang memiliki sumber pendapatan lain seperti pajak daerah atau investasi.
- Contoh : Kota Surabaya atau Bandung mungkin bisa mengoptimalkan pendapatan lainnya, tetapi Kabupaten/Kota dari daerah 3T akan mengalami kesulitan mencari alternatif pendanaan.

### Dampak Ekonomi

#### Penurunan Belanja Daerah

- Berkurangnya transfer dari pusat, pemerintah daerah mungkin harus memangkas belanja operasional dan pembangunan, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.
- Contoh : Anggaran untuk perbaikan jalan Kabupaten/Kota akan berkurang.

#### Dampak Pada Proyek Infrastruktur

- Proyek pembangunan yang bergantung pada dana pusat bisa tertunda atau dibatalkan, menghambat peningkatan konektivitas dan layanan publik.
- Contoh : Berkurangnya dukungan pembiayaan pembangunan jembatan di desa dan layanan publik lainnya.

#### Penurunan Daya Beli Masyarakat

- Jika anggaran daerah untuk bantuan sosial dan subsidi berkurang, masyarakat yang bergantung pada program pemerintah bisa mengalami kesulitan ekonomi.
- Contoh : Kebijakan ini bisa mengurangi jumlah bantuan sosial yang selama ini dibiayai oleh pemerintah daerah seperti bantuan rumah layak huni, bantuan kesehatan, subsidi transportasi dan UMKM dll.

### Dampak Politik

#### Potensi Ketegangan Antara Pusat dan Daerah

- Jika daerah merasa diperlakukan tidak adil, bisa muncul resistensi politik atau desakan untuk perubahan kebijakan fiskal.
- Contoh : Ada potensi meningkatnya ketidakpercayaan tokoh di daerah yang rentan konflik atas keberpihakan negara/pemerintah pusat.

#### Bertentangan dengan Semangat Desentralisasi

- Pemangkasan anggaran daerah mengurangi kemandirian fiskal daerah, bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menentukan kebijakan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal.
- Contoh : Otoritas kepala daerah akan semakin tergerus dalam menyusun kebijakan dengan adanya pembatasan fiskal dari pusat.

# 5

## Diversifikasi Sumber Pendapatan Negara Melalui Pajak Alternatif

Tabel Pajak Alternatif

Jenis Pajak	Tarif Pajak	Potensi Penerimaan Negara per Tahun
Pajak Harta Orang Super Kaya	2%	Rp81.560.520.000.000
Pajak Produksi Batu Bara	30%	Rp47.599.875.000.000
Pajak Windfall Komoditas Ekstraktif	25%	Rp42.717.375.000.000
Pajak Karbon	USD5/ton	Rp69.750.000.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp241.627.770.000.000</b>

Sumber: Celios, 2024<sup>14</sup>



# Terima kasih

Laporan dapat diunduh pada lama website [Celios.co.id](http://Celios.co.id)

